



Kebut Pengentasan Kawasan Kumuh di Kota Jogja

Pemkot Targetkan Berkurang 15 Ha, Tahun Ini Jadi 42,14 Ha

JOGJA - Luas kawasan kumuh di Kota Jogja masih cukup besar hingga tahun ini. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUP-KP) mencatat, hingga akhir 2024, kawasan kumuh yang tersisa mencapai 57,14 hektare (Ha).

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPKP Kota Jogja Sigit Setiawan mengatakan, pada tahun ini menargetkan pengurangan kawasan kumuh sebesar 15 hektare. Dengan pencapaian tersebut, luas kawasan kumuh

di Kota Jogja diharapkan menyusut menjadi 42,14 hektare.

"Target pengentasan kawasan kumuh di Kota Jogja harus selesai pada 2031 mendatang, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Jogja Nomor 158 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh," katanya.

Sigit membeberkan, kawasan kumuh di Kota Jogja tersebar di sembilan kemitraan. Terbesar ada di Mantrijeron dengan luas 15,34 hektare, disusul Umbulharjo dengan luas 10,59 hektare, Wirobrajan 10,08 hektare, Kotagede 7,91 hektare.

Lalu Tegalarjo dengan luas 4,93 hektare, Mergangsan 4,58 hektare, Jetis 1,90 hektare, Gondokusuman 1,10 hektare, serta

LUASAN DI SEMBILAN KEMITRAAN								
1	Mantrijeron	15,34 Ha	4	Kotagede	7,91 Ha	7	Jetis	1,90 Ha
2	Umbulharjo	10,59 Ha	5	Tegalarjo	4,93 Ha	8	Gondokusuman	1,10 Ha
3	Wirobrajan	10,08 Ha	6	Mergangsan	4,58 Ha	9	Ngampilan	0,74 Ha

Ngampilan 0,74 hektare.

"Sementara untuk kemitraan seperti Gondomanan, Gedongtengen, dan Danurejan sudah selesai pengentasan kawasan kumuhnya," ujarnya.

Menurutnya, kriteria kawasan kumuh di Kota Jogja ditentukan dalam beberapa kategori. Meliputi keteraturan bangunan gedung, ketersediaan jalan lingkungan, kelayakan drainase, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem

penyediaan air minum, serta proteksi kebakaran.

"Untuk pengentasan kawasan kumuh kami juga bekerjasama dengan kemitraan dan kelurahan," jelasnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto menyampaikan, pemkot terus mendukung berbagai kegiatan penataan kawasan kumuh. Salah satunya dengan konsep perumahan dan permukiman layak huni (Mahan-

nanni). Yakni menyulap kawasan kumuh di bantaran sungai menjadi permukiman warga yang layak huni.

Konsep ini telah diterapkan di beberapa lokasi, seperti Kampung Terban, dengan menyulap kawasan kumuh di bantaran sungai menjadi lingkungan permukiman yang lebih nyaman.

"Penataan kawasan kumuh bukan hanya soal memperbaiki bangunan, tetapi juga memperhatikan aspek konstruksi, keamanan, serta partisipasi aktif masyarakat," kata Sugeng.

Dengan pendekatan ini, diharapkan kawasan kumuh di Jogja tidak hanya tertata lebih baik, tetapi juga semakin ramah lingkungan dan keamanan. (inu/wia/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005